



DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH SULAWESI SELATAN,
KEPALA PT JASA RAHARJA CABANG SULAWESI SELATAN

NOMOR SOP KEP/12/XI/2021, 1136/XI/TAHUN 2021, P/36/SP/2021

TGL PEMBUATAN 17 NOVEMBER 2021

TGL REVISI

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP SOP Registrasi, Pembayaran PKB dan SWDKLLJ Pengesahan Ranmor Pada Gerai Samsat dan Keadai Samsat

DASAR HUKUM:

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 127 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- Pendidikan setingkat SMA/SMK/Sl;
- Dapat mengoperasikan komputer;
- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan jenis-jenis pungutan pajak daerah, PNPB, dan SWDKLLJ/DPWKP;
- Memiliki integritas dan profesional dalam bidangnya; dan
- Memiliki mental budaya melayani serhum, sapa, salam, sopan, dan santun.

KETERKAITAN

-

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- Telpon
- Pulpen
- Kertas
- Aplikasi data kendaraan
- Printer
- Blangko TBPKP/SKPD
- Stempel dan bantalan stempel
- Inventer Listrik
- Komputer/Laptop

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Petugas Kepolisian	Petugas Penetapan	Petugas Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	menerima STNK/SKPD tahun sebelumnya dari wajib pajak lalu melakukan pendaftaran kendaraan bermotor	<input type="checkbox"/>			1. pulpen 2. kertas 3. aplikasi data kendaraan 4. internet	5 menit	Data wajib pajak	
2	menginformasikan ke wajib pajak jumlah kewajiban pembayaran		<input type="checkbox"/>		1. Laptop/komputer 2. aplikasi data kendaraan 3. internet	5 menit	Informasi jumlah kewajiban pembayaran	
3	menerima pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembayaran SWDKLLJ dan DPWKP (khusus untuk angkutan umum) dari wajib pajak sesuai dengan jumlah nominal kewajiban pembayaran pada SKPD, serta mencetak SKPD selanjutnya menyerahkan ke petugas Kepolisian			<input type="checkbox"/>	1. blangko TBPKP/SKPD 2. Komputer 3. Printer 4. Aplikasi data kendaraan 5. Mesin hitung uang 6. Money detector 7. Jaringan internet	5 menit	Uang tunai dan/atau non tunai	
4	menerima STNK, membubuhi stempel pengesahan STNK dan menyerahkan STNK dan SKPD ke wajib pajak	<input type="checkbox"/>			1. Stempel pengesahan 2. Tinta stempel 3. Bantalan stempel	5 menit	kolom pengesahan pada STNK yang sudah diparaf dan distempel serta diberi tanggal	
5	hasil penerimaan PKB disetorkan ke RNUD dan dilaporkan ke Bendahara Penerima 1 (satu) hari kerja dengan mengisi blangko Tanda Bukti Setor yang menyebutkan rincian penerimaan.			<input type="checkbox"/>	Surat Tanda Setoran	15 menit	laporan	